



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dipasangkan dengan Jokowi menjabat sebagai wakil gubernur DKI pada 2012, atas dukungan partai PDIP dan Gerindra (Rahayu, 2012, para. 2). Pada 15 Oktober 2012 pasangan ini resmi sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012–2017.

Namun di tengah masa jabatan sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, Ahok resmi naik menjadi gubernur pada 2014, menggantikan Jokowi yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia (Restu, 2014, para. 1).

Di tengah masa kepemimpinan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta, terjadi perselisihan antara Ahok dengan partai Gerindra terkait perbedaan pandangan tentang rancangan undang–undang (RUU) Pilkada, karena partai Gerindra setuju dengan Pemilihan Kepala daerah yang dipilih langsung oleh DPRD. Sedangkan Ahok menilai RUU tersebut “membunuh” demokrasi di Indonesia. Akhirnya pada 10 September 2014, Ahok menyatakan telah keluar dari Partai Gerindra (Aziza, 2014, para. 2).

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik (parpol) menurun, sebab parpol dinilai gagal dalam melakukan rekrutmen. Peran parpol pada 2014 mencapai 58,74 dan terjadi penurunan pada 2015 menjadi 56,30 (ICRP, para. 9).

Kini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI sudah semakin dekat, Ahok kembali mencalonkan dirinya sebagai gubernur melalui jalur independen (perseorangan). Syarat yang dikeluarkan KPUD untuk maju melalui jalur independen yaitu pengumpulan KTP sebanyak 532,213 lembar (Romadoni, 2016, para. 2).

Jalur independen adalah seseorang yang mencalonkan dirinya untuk menjadi pemimpin dengan tidak melalui jalur partai politik sebagai syarat pencalonan independen, Ahok harus mencari dukungan secara perseorangan dengan membangun tim sendiri agar bisa mencalonkan diri (Widodo, 2016, para. 3).

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2015, calon independen harus kumpulkan KTP 7,5 % dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara 6-12 juta. Sementara DPT Jakarta pada 2012 adalah 6.996.951. Artinya, Ahok paling tidak harus mengumpulkan KTP sekitar 525 ribu Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Mahkamah Konstitusi, para. 3).

Latar belakang berdirinya Teman Ahok adalah untuk memenuhi persyaratan calon independen. Teman Ahok adalah sekelompok anak muda yang menjadi relawan untuk membantu Ahok maju dalam Pilkada 2017. Dengan visi mewujudkan Jakarta yang modern, rapi, dan manusiawi (Temanahok, 2015, para. 1). Teman Ahok berhasil mengumpulkan KTP mencapai 1.0264.632 melebihi target yang di tentukan yaitu 532,213 dan pengumpulan KTP tersebut dilakukan dalam waktu satu tahun (Teman Ahok lampau target, kumpulkan lebih dari satu juta KTP, 2016, para. 1).

Di tengah dukungan Ahok sebagai calon independen, Ahok akhirnya memutuskan untuk masuk jalur partai politik dan keluar sebagai calon independen. Ahok pun mendapat dukungan dari beberapa partai politik besar. Perhitungan kursi yang menyatakan akan mendukung Ahok melalui jalur partai kini sudah memenuhi syarat yakni partai Nasdem, Hanura dan Golkar (Aziza, 2016, para. 3).

Akhirnya pada Rabu 27 Juli 2016 saat halal bihalal bersama Teman Ahok. Ahok menyampaikan akan maju dalam Pilkada 2017 melalui jalur politik, namun setelah mengumumkan terjadi pro dan kontra terhadap keputusan yang diambilnya. Warga yang pro masih tetap mendukung Ahok walau kini menggunakan jalur partai politik, jika yang kontra mereka memprotes apa yang di lakukan Ahok, lalu menarik

kembali KTP tersebut dan komentar #BalikinKTPGue melalui media sosial (twitter) (Paskalis, 2016, para. 3).

Setelah Ahok mengumumkan bahwa dirinya akan maju melalui partai politik, kini saatnya PDIP yang mengumumkan calon gubernur yang akan diusung olehnya. PDIP melaksanakan jumpa pers pada 20 September 2016 di kantor PDIP Jalan Diponegoro Jakarta, dan mengumumkan bahwa pertainya akan mendukung Ahok dalam Pilkada 2017 (Ovier, 2016, para. 1).

Media nasional yang tertarik membahas tentang kembalinya Ahok ke jalur partai politik, seperti pada koran Rakyat Merdeka yang menuliskan kalau Teman Ahok menjadi Teman Kapok, itu dikarenakan rasa kekecewaan terhadap Ahok yang mengambil jalur partai “kecaman terhadap inkonsistensi Ahok bertebaran lewat meme Teman Kapok dan permintaan untuk mengembalikan KTP yang sudah dikumpulkan melalui tanda pagar (hastag) #BalikinKTPGue.

Salah satu pemilik akun @anhajhe yang menulis “Aku yang tersakiti- Judika. Iya gpp yang penting kamu bahagia *tapi nyesek #BalikinKTPGue”. Jika di koran Sindo menuliskan “jadi pemimpin beranilah mengambil resiko, tidaklah melepas resiko”.

Kini Ahok terlihat berbalik, sebab dari awal ingin maju mencalonkan diri pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen, namun kini akan menggunakan partai politik sebagai kendaraan yang akan dipakai untuk maju dalam pilkada (Tripeni, 2016, para. 3).

Untuk mendapatkan informasi manusia tidak hanya mengadakan disekeliling saja, namun kita membutuhkan media untuk bisa mendapatkan informasi dan tentu akan dipengaruhi dengan bagaimana media mbingkai tersebut (Eriyanto, 2002, Para. 1).

Konstruksi didefinisikan sebagai kebenaran dan menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya. Analisis framing bisa dikatakan untuk mengetahui bagaimana sebuah realitas itu dikonstruksi oleh media (Eriyanto, 2002, Para. 4). Apakah didalam berita tersebut ada yang dihilangkan atau disembunyikan.

Berangkat dari hal di atas akan menarik melihat bagaimana koran Media Indonesia dan koran Tempo membingkai bergabungnya calon petahana Basuki Tjahaja Purnama dengan partai politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Peneliti memilih koran Media Indonesia sebagai objek penelitian karena sampai saat ini Ahok masih memiliki kartu keanggotaan Nasional Demokrat (NasDem) dan juga Ahok beserta partai NasDem masih mempunyai kesamaan yaitu menolak pelaksanaan Pilkada dikembalikan ke DPRD (Rudi, 2014, para. 2).

Alasan peneliti memilih koran Tempo sebagai objek penelitian karena koran dan majalah tempo sempat memicu perdebatan, majalah Tempo memicu mengenai pencairan dana yang dilakukan untuk pendirian Teman Ahok, jika di sampul koran Tempo di persoalkan mengenai aliran dana dari pengembang reklamasi. Semakin dekat dengan Pilkada DKI isu tersebut menjadi perdebatan pada kalangan pendukung Ahok dan penentang Ahok. (Mendebat dugaan dana reklamasi Rp30 miliar, Tempo dan Teman Ahok, 2016, p. 14).

Pada penelitian kali ini peneliti memilih periode 28 Juli 2016 hingga 4 Agustus 2016 karena pada 27 Juli 2016 Ahok mengumumkan akan masuk jalur partai politik, dan berita akan muncul pada keesokan harinya tepat tanggal 28 Juli 2016. Berhenti di tanggal 4 Agustus 2016 karena pada satu minggu pertama berita tersebut sedang menjadi perbincangan di media massa.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, bagaimana pembedaan koran Media Indonesia dan koran Tempo terhadap isu bergabungnya calon petahana Basuki Tjahaja Purnama dengan partai politik.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pembedaan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama terkait bergabungnya dengan partai politik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademis

Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan analisis framing yang berhubungan dengan calon Petahana dan Pilkada.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran atau deskripsi bagaimana cara wartawan membingkai suatu peristiwa dan khalayak juga bisa memilih media mana objektif.

UMMN